

TAHUN ANGGARAN 2026-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERDA KOTA METRO NO. 8 TAHUN 2025, LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 8 : 14 HAL

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.-

- bahwa APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD.

berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

CATATAN : - APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- APBD meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- Dalam keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Rincian APBD tercantum dalam 17 (tujuh belas) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Desember 2025.